

Memahami Konsep Keamanan Energi: Antara Pendekatan Tradisional dan Non-Tradisional

Uni W.Sagena¹

M. Hasyim Mustamin²

Abstract:

This article focuses on energy security as a fairly new concept in the study of strategy and international security. The concept of energy security can be analyzed in a narrow but it also has a broad dimensions (widening) and can be reviewed in depth (deepening). In addition, energy also has an important meaning, particularly oil resource because it is not only economic commodity, but also a strategic material which may be a source of power with political and military implications. The study of this concept is also quite important because energy is a country needs for the development continuity or a global needs, it is also important for the ranking of each individual human being. Therefore, in the study of energy security, it can be analyzed either by using traditional approaches as well as non-traditional approaches. Indeed it is, this paper aims to explore what the experts and observers think about the concept of energy security, because there are differences trends and perceptions among them. Thus, this paper is expected to increase the understanding of this concept and give the contribution of science as one of the references in the deeper writing or research about energy in Indonesia, especially in East Kalimantan Province with a huge energy exploration and production.

Keywords: energy security, approaches, traditional, non-tradisional

PENDAHULUAN

Keamanan energi (*energy security*) merupakan salah satu bentuk cabang dari isu-isu keamanan yang terhitung baru populer karena pada masa dahulu kurang mendapat perhatian oleh peneliti atau pengamat studi keamanan (*security*

¹ Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim. Saat ini sedang aktif mengkaji isu-isu energi dan strategi keamanan global. E-mail: unisku@yahoo.com.

² Dosen Pendidikan Agama Islam di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim. Konsentrasi kajian seputar filsafat dan sejarah pendidikan beserta berbagai dimensinya. E-mail: syim_mustamin@yahoo.com

studies). Pada awalnya, istilah keamanan energi hampir tidak pernah terdengar di luar komunitas analis energi, namun lambat laun isu keamanan energi belakangan ini menjadi wacana yang semakin menonjol dalam kebijakan nasional sebuah negara atau bidang pemerintahan, baik secara global pun lokal. Michael T. Klare (2008:483) menegaskan bahwa kini isu keamanan energi telah mendapat tempat dalam perhatian para pembuat kebijakan, para peneliti, maupun warga negara di seluruh dunia. Bahkan menjadi unsur utama dalam pembuatan politik luar negeri maupun politik domestik.

Contohnya, kata Klare, adalah pernyataan resmi yang sering diungkapkan mantan presiden Amerika Serikat George W. Bush (Mac 2001) dalam kutipan pidatonya *“energy security should be a priority of our foreign policy and govern key elements of domestic policy”*. Pandangan yang sama telah dinyatakan oleh pejabat-pejabat negara yang dengan menekankan arti penting isu energi ini. Oleh karena itu, isu keamanan energi perlu dieksplorasi lebih luas lagi bagi meningkatkan pemahaman sekaligus mempopulerkan kajian mengenai keamanan energi ini. Urgensi lainnya adalah karena isu tentang energi tidak hanya penting bagi kelangsungan pembangunan negara-bangsa atau kehidupan secara global melainkan juga penting bagi unit terkecil dalam masyarakat lokal seperti keluarga dan individu.

Arti penting konsep ini juga terletak pada sifat dasar energi yang merupakan keperluan azas bagi kelangsungan hidup manusia. Semakin kompleks dan produktif suatu masyarakat, maka semakin besar pula keperluannya terhadap energi seperti untuk mendapatkan makan dan minum, membangun kota dan perekonomiannya, menjalankan pabrik-pabrik industri, kapal, jalan-jalan, jalur kereta api, dan sebagainya (Michael T. Klare 2008:484). Khusus mengenai bahan bakar fosil (*fossil fuels*) seperti minyak dan gas, merupakan komoditas penting dan utama sehingga sering menimbulkan kekhawatiran bagi berbagai pihak apabila terjadi kelangkaan, krisis, atau ketidakamanan energi. Kerawanan ini bersumber dari sifat minyak sendiri yang bukanlah merupakan komoditas biasa, melainkan bahan strategis yang dapat menjadi sumber kekuatan dan pengaruh dengan implikasi politik yang besar pula (Ma Xiojung 2005, Joseph S. Nye 2007). Sehingga, kata Paul French dan Sam Chambers (2010:16), *“... oil is never far from the news”*, yang bermaksud minyak selalu menjadi bahan perebutan dan kontestasi kekuatan sehingga akan selalu menjadi pemberitaan.

Secara global, bahan bakar minyak-gas-batubara sejak lama telah menjadi perhatian dunia, terutamanya di negara-negara industri Barat yang terlebih dahulu telah mengalami periode industrialisasi besar-besaran. Semakin banyak negara industri yang menghadapi situasi ketergantungan, terutama Amerika Serikat, China, Jepang, Korea, India terhadap impor minyak dari luar negeri. Ketergantungan itu meningkat terus menerus dalam beberapa dekade terakhir ini yang menjadi indikator kuat tingginya nilai strategis minyak berbanding sumber-sumber energi lainnya bagi pertumbuhan ekonomi dan industri negara maju tersebut.

Secara nasional dan lokal pula, kebutuhan dan permintaan akan migas dan batubara tetap tinggi. Bahkan dalam konteks daerah Kalimantan Timur yang dikenal

sebagai salah satu lumbung utama energi terbesar di Indonesia, isu tentang energi tetap menjadi perhatian utama pemerintah dan non-pemerintah (terutama pihak universitas dan LSM) karena wilayah ini mengalami sebuah paradoks, yaitu kaya akan energi namun mengalami situasi krisis atau ketidakamanan energi (*energy insecurity*).

Di Kalimantan Timur sendiri, pemahaman tentang isu energi ini sebenarnya sudah terbangun, namun masih bersifat terbatas dan sektoral. Terlihat ketika basis perkembangan ekonomi Kalimantan Timur bergeser dari sektor kehutanan (1970-1990) berubah menjadi sektor pertambangan minyak dan gas bumi (1990-2000), lalu berubah lagi menjadi sektor tambang non-migas yaitu batubara (2000-2012). Pergeseran tersebut membuktikan bahwa: *pertama*, secara faktual, daerah ini *telah gagal* mempertahankan kekuatan ekonominya dari sektor migas dan cenderung berulang pada sektor batubara (kondisi pasca tambang). Dengan kata lain, gagal melaksanakan pembangunan energi yang berkelanjutan (*unsustainable development*); *kedua*, secara konseptual, kondisi energi Kalimantan Timur selama ini sebenarnya termasuk dalam kategori tidak aman (*insecure*). Besarnya cadangan minyak yang dimiliki Kalimantan Timur bukanlah jaminan keamanan energi sebab isu energi sesungguhnya melebihi persoalan bekal (supply), melainkan juga persoalan distribusi dan konsumennya.

Secara ilmiah dan sebagai kajian akademik keilmuan pula, isu tentang keamanan energi juga masih kurang populer diangkat dan diteliti mengingat masih minimnya pembahasan tentang isu tersebut apabila dibandingkan dengan besar dan luasnya problem energi yang dihadapi daerah Kalimantan Timur ini. Kondisi ini tentu kurang ideal dan kurang seimbang sehingga diperlukan konsepsi, perspektif, dan wawasan tentang keamanan energi yang lebih luas dan tajam lagi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menekankan, mempertajam dan melakukan eksplorasi mengenai konsep keamanan energi sebagai sebuah kajian yang memiliki dimensi luas sekaligus dapat ditinjau secara dalam - sebagai tambahan referensi bagi penelitian yang lebih lanjut.

Artikel ini akan diuraikan dalam beberapa bagian yaitu: pertama, menjelaskan bangunan atau kerangka konsep keamanan energi itu sendiri beserta pendekatan-pendekatannya. Kedua, menjelaskan lebih dalam konsep keamanan energi melalui perbedaan persepsi dan perspektif ancaman yang ada. Ketiga, menguraikan relevansi konsep keamanan energi untuk konteks Kalimantan Timur sebagai lumbung energi di Indonesia. Bagian terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BANGUNAN KONSEP DAN PENDEKATAN KEAMANAN ENERGI

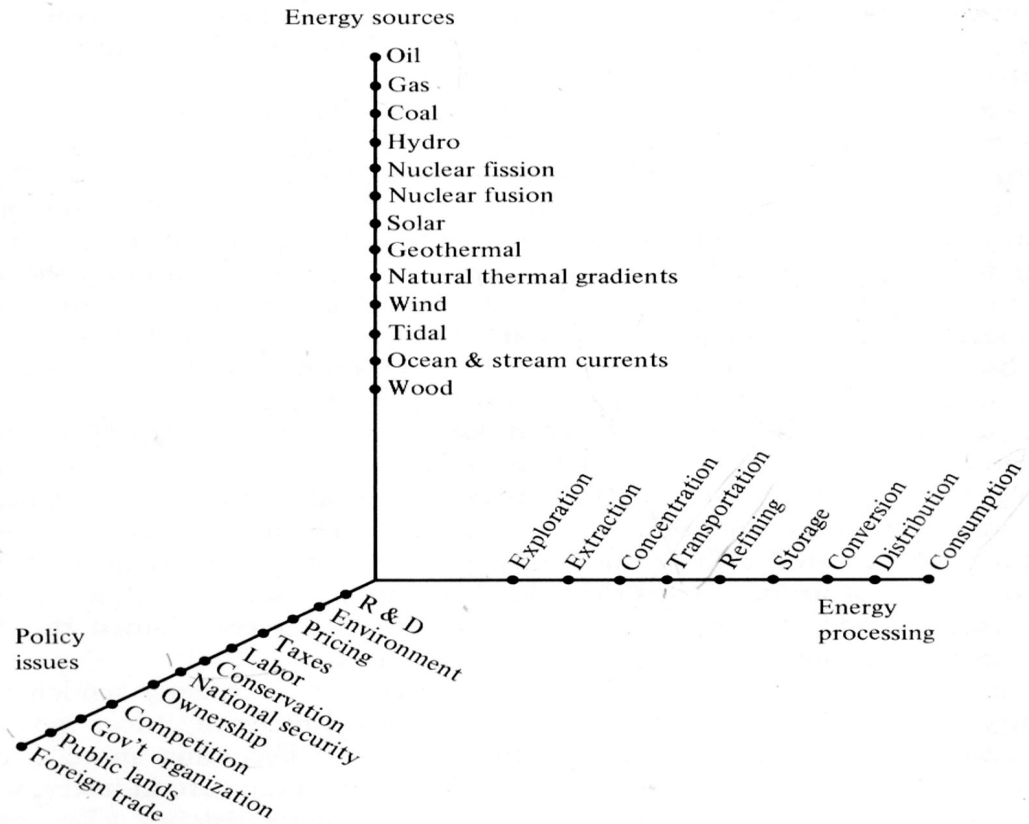
Konsep Keamanan dan Energi

Dari asal katanya, konsep keamanan energi terbentuk dari konsep *energi* dan *keamanan* itu sendiri meskipun keduanya tetap mengenai keamanan energi. Pada mulanya, energi berada di luar studi-studi keamanan (*security studies*) namun kemudian menjadi cabang dari kajian tersebut. Masuknya isu energi ke dalam studi keamanan melalui suatu proses yang disebut dengan sekuritisasi isu-isu (*issues securitization*). Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde (1998) mendefinisikannya sebagai suatu proses pengidentifikasian suatu isu tertentu, baik politik maupun non-politik, yang bertujuan untuk menjadikan isu tersebut sebagai agenda keamanan. Sekuritisasi dapat juga dilihat sebagai bentuk lain dari politisasi (*politization*).

Secara sederhana, definisi energi adalah apa yang digunakan orang untuk dapat terus wujud (*exist*) dan berkembang (Gordon J. Aubrecht, II 2006:2), sedangkan definisi mengikut Richard C. Dorf (1978:467), energi adalah kapasitas atau kecakapan untuk melakukan kerja. Menurut Dorf, dari segi sumbernya, energi mempunyai banyak bentuk yang diperlukan untuk membuat kerja-kerja tersebut seperti minyak, gas, batu bara, solar, angin, nukliar dan sumber yang bisa diperbaharui lainnya³.

Selain itu, dari segi proses energinya, energi melalui proses yang panjang mulai dari saat dieksplorasi (*exploration*), distribusi sehinggalah tiba bagi konsumen (*consumption*). Dari segi isu politiknya juga terbentang luas, mulai dari politik melakukan *research and development* (R & D), keamanan negara (*national security*) dan persaingan (*competition*), sehingga perdagangan asing (*foreign trade*). Ketiga segi energi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

³ Penjelasan detail mengenai ini lihat Gordon J.Aubrecht 2006; Richard C.Dorf 1978.



Tabel 1. Model tiga dimensi isu energi (Richard C. Dorf, 1978: 12)

Hubung kait antara ketiga-tiga segi tersebut dapat sangat beragam dan bertindih. Namun, apabila ditinjau dari segi literatur yang telah ada sejauh ini, terdapat dua trend dalam literatur energi sebagaimana diuraikan oleh Xu Yi-chong (2007:43): di satu sisi, ada kumpulan literatur yang fokus pada isu energinya saja sebagai sebuah komoditas. Kumpulan tersebut lebih banyak membicarakan mengenai pengaruh energi terhadap kemajuan ekonomi (suatu negara), di mana semakin maju ekonominya semakin besar pula energi diperlukan, khususnya dalam penggunaan listriknya. Dijelaskan oleh Yi-chong, “... a large proportion of primary energy is converted to electricity and indeed, the more advanced the economy, the largest is the proportion of electricity of the final energy consumption” Oleh itu, menurut Yi-Chong, keutamaan penelitian energi diperlukan bukan saja agar mendapatkan cadangan energi yang banyak, tetapi yang lebih penting adalah agar menjamin *reliable supply* bagi konsumen energi. Selain itu, dalam kumpulan literatur energi ini sering dilihat sebagai sebuah politik domestik saja (seperti kebutuhan listrik negara) dengan implikasi yang sedikit terhadap politik internasional atau konflik karena energi. Kumpulan ini dikategorikan *non-alarmist*.

Sebaliknya, adalah kumpulan literatur yang lebih fokus tentang isu keamanan (*security*) itu sendiri. Defenisi aman secara luas dan sederhana adalah kondisi yang

bebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam perpektif tradisional, ancaman dipandang melalui pendekatan realis dimana kekuatan militer sering menjadi unsur terpenting bagi melindungi kepentingan nasional sebuah negara (*national interest*)⁴. Keamanan energi dalam hal ini berarti lebih menekankan status aman atau memastikan negara bebas dari ancaman, gangguan, dan bahaya sehingga energi yang dimaksud lebih bersifat “...*supply-oriented, stated-centred, oil- and gas-focused and confrontational*.” Bagian literatur yang ini termasuk dalam katagori *alarmist* yaitu kalangan yang selalu berbicara mengenai ancaman atau situasi yang mengkhawatirkan.

Pendekatan Tradisional dan Non-Tradisional

Pendekatan *alarmist* merujuk pada pendekatan realis yang umumnya digunakan dalam kajian *traditional security* atau disebut juga *conventional security*. *Traditional-security (TS)* ditafsirkan sebagai bentuk ancaman keamanan aspek militer atau ancaman fisik yang datang dari luar negara. Oleh kerana itu, strategi negara untuk melindungi atau meraih kepentingannya cenderung menggunakan alat-alat militer seperti persenjataan, peluru balistik (*ballistic missile*), nuklir, dan instrumen *hard-power* lainnya. Isu-isu ancaman mengenai inilah yang menjadi kajian dalam *traditional-security* dan menjadi diskursus yang sangat kerap digunakan dalam menganalisis bentuk ancaman keamanan dan tatanan internasional pada masa-masa Perang Dunia dan Perang Dingin.

Namun, selepas berakhirnya Perang Dingin di tahun 1989, wacana *security* mengalami pergeseran besar ketika isu-isu *non-traditional security (NTS)* menjadi lebih populer dalam melihat *security* global yang menunjukkan peningkatan kerjasama dan saling ketergantungan dalam era globalisasi ini. Fenomena pergeseran perhatian dari *traditional-security* kepada *non-traditional security* dipengaruhi oleh tiga peristiwa besar yang terjadi selepas masa Perang Dingin. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah *pertama*, krisis keuangan Asia antara tahun 1997-1998; *kedua*, peristiwa 11 September di tahun 2001 yaitu runtuhnya lambang supremasi Amerika Serikat (Pentagon dan WTC) serta; *ketiga*, adalah merebaknya epidemik SARS di China dan dunia pada tahun 2003 (Wang Yong 2005). Peristiwa-peristiwa tersebut membawa implikasi besar terhadap perubahan persepsi ancaman dan menimbulkan kesadaran umat manusia di dunia ini untuk lebih baik memilih bekerjasama menghadapi ancaman-ancaman *non-traditional security* ini. Kesadaran demikian sangat logis sebab hampir semua negara di dunia ini menghadapi ancaman-ancaman bersama tersebut.

Dalam implementasinya, antara keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional sering memiliki kaitan dan saling mempengaruhi, utamanya apabila *keamanan non-tradisional* merupakan kepentingan nasional (*nastional interest*) suatu negara sehingga negara dapat saja menggunakan unsur kekuatan militer untuk melindungi kepentingan nasional tersebut.

⁴ *National security* dalam *International Encyclopaedia of the Social Science* mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar negeri.

DIMENSI DAN PERBEDAAN PERSEPSI ANCAMAN

Konsep keamanan energi memiliki berbagai defenisi dengan penekanan yang berbeda-beda, sebab tidak ada standarisasi baku dalam definisi keamanan energi. Perbedaan penekanan lebih berdasarkan persepsi antara pihak pengguna energi (*consumers*) dengan penghasil energi (*producers*) atau antara negara eksportir maupun negara importir. Meskipun demikian, mayoritas negara menggunakan tiga indikator dalam konseptualisasinya. Seperti definisi keamanan energi dari UNDP (World Energy Assessment, 2000) yaitu suatu kondisi ketersediaan cadangan sumber minyak dengan kuantitas yang cukup dan harga yang terjangkau. Mirip pendapat singkat Xu Yi-chong (2007:43), *energy security means the security of adequate and reliable energy supply at a stable price*. Menurut Bernard D. Cole (2008:159) pula, definisi keamanan energi dilihat dalam tiga elemen utama yaitu: ketersediaan energi (*energy availability*), keterhasilan energi (*energy affordability*), dan kemampuan militer (*military capability*) untuk menyelamatkan persediaan energi yang dikehendaki. Tsutomu Toichi (2006) pula mendefinisikan keamanan energi bermaksud penyelamatan atas bekal energi (*energy supply*) yang stabil yang telah menjadi tujuan kebijakan dari negara-negara utama pengimport minyak⁵. Ada pula yang mengukur keamanan energi berdasarkan keamanan produksinya, keamanan konsumsinya, dan keamanan distribusinya.

Namun, perlu ditekankan adanya istilah *sufficient* (berkecukupan) digunakan secara identik dengan *security*, walaupun sebenarnya kedua istilah ini berbeda. Keamanan menjangkau hingga manajemen pengolahan dan proses energi dilakukan hingga bagaimana energi itu digunakan dengan tujuan pembangunan masyarakat dan ekonomi. Seperti dijelaskan oleh pakar energi Zha Daojiong (2010:2) bahwa:

“...energy self-sufficiency is not the same thing as energy security. A country has meaningful energy security when its management of energy supply and demand serves the purpose of developing of its economy and society”.

Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi dalam melihat ancaman-ancaman keamanan energi yang ada. Hasilnya, menurut beberapa pengamat, tidak ada konsensus dalam konsep keamanan energi (Leo Schrattenholzer 2009: 355) sehingga mempunyai berbagai arti atau definisi bergantung pada pandangan negara-negara yang terlibat (Michael T. Klare 2008:488). Walaupun, menurut Klare, sebetulnya bagi hampir setiap negara di planet ini, keamanan energi berarti mengamankan energi yang cukup untuk memenuhi keperluan vitalnya di masa sekarang maupun masa depan. Satu yang pasti yaitu kesamaan pandangan tentang

⁵ Contohnya seperti Jepang, China, dan Amerika Serikat serta negara industri Eropa lainnya.

arti “*the absence of risk*” atau ketiadaan risiko dalam keamanan energi yang mengikat semua konsep keamanan energi tersebut di atas. Dijelaskan oleh Schrattenholzer (2009) bahwa:

”...*the aspect of risk should guide the analysis of energy security. Accordingly, `security` is understood as the `absence of risk` and risk as the `probability of an unwanted event`”.*

Oleh kerana itu, definisi keamanan energi bagi pihak konsumen, produsen, importir, maupun eksportis adalah kondisi yang bebas dari segala bentuk risiko atau *unwanted events* seperti bahaya, kecemasan, dan ketakutan dari sektor energi.

Dimensi-dimensi Keamanan Energi

Ancaman yang timbul dari energi juga dapat dilihat secara sempit maupun luas sebagaimana konsep keamanan itu sendiri. Apabila dilihat dari jenis-jenis isunya, ancaman keamanan dapat dikelompokkan secara garis besar ke dalam dimensi militer dan non-militer. Adapun *referent object* keamanan ada yang dibagi pada level negara, aktor non-negara, dan individu (Peter Hough, 2004: 12). Konsep yang sempit ini merujuk pada dimensi militer dimana negara menjadi *referent object* sebagaimana asumsi utama perspektif realis yang digunakan dalam kajian *traditional security* atau *conventional security*.

Namun, sejak tahun 1990-an, dimensinya telah mengalami proses perluasan dan lebih mendalam, keamanan atau ketidakamanan (*insecurity*) dapat dikelompokkan dalam lima dimensi yang ditawarkan oleh Copenhagen School (lihat table 2). Kini, dalam dimensi keamanan juga mencakupi dimensi politik, ekonomi, sosial, dan dimensi lingkungan hidup yang disebut dengan “*the horizontal `widening` in five dimension or sectors*”. Dapat juga diperdalam melalui “*vertical `deepened` to different actors or referent objects*” yang merujuk pada level aktor yang berbeda (*referent object*). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada keamanan nasional negara saja (*national security*), tetapi juga menawarkan level aktor lainnya, seperti manusia (*human security*), masyarakat (*social security*), wilayah atau kawasan (*regional security*), demikian pula level internasional atau global (*global or international security*) (Leo Schrattenholzer 2009:355, Hans Gunter Brauch 2009:34).

Dengan demikian, keamanan energi dapat dilihat dan dianalisis untuk lima dimensi yang berbeda tersebut dan dengan semua objek referensi yang berbeda pula (lihat table 2). Singkatnya, sektor energi merupakan salah satu konsepsi yang memiliki kompleksitas, fleksibilitas, dan elastisitas kerana bersifat multidimensi yang bisa didekati dalam lima dimensi dan atau dianalisis secara berperingkat berdasarkan referensi aktornya.

Security dimension (reference object) ⇨ ⇩	Military	Political	Economic	Environmental	Society
Sectoral security concept	(The sectoral security concept cut across Dimensions and referent object) <i>Energy, food, health, water, and livelihood</i>				
Human security					
Village/Community/Society					
National security					
International security					
Regional security					
Global/planetary security					

Tabel 2. Dimensi vertikal dan horizontal dari konsep keamanan di Utara dan Selatan (sumber: Hans Gunter Brauch, 2009:34)

Tabel di atas menunjukkan perkembangan konsep keamanan energi yang kini lebih bersifat *multifaces* dan multidimensi sehingga seringkali mengalami dimensi yang bertindih satu sama lain (*overlapping*). Contohnya, kajian Nazli Choucri (1976:xiii) yang mengaitkan energi dengan dimensi politik bahwa:

”... masalah energi pada hakikatnya adalah problem politik juga-mulai dari perdebatan mengenai siapa yang mengontrol transaksi energi, apa aturan main yang digunakan, siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang rugi, dan pengorbanan apa untuk siapa”.

Dengan kata lain, dalam isu energi juga menyangkut persoalan yang menjadi adagium dalam realitas dunia politik: *who get what, when and how*. Mirip dengan itu adalah pernyataan dari pakar energi dunia, Fereidun Fesharaki et.al (1982:290) yang menyatakan bahwa keamanan sumber-sumber energi adalah bagian integratif dalam hal keamanan negara (*national security*) maupun keamanan internasional (*international security*). Demikian pula energi yang beririsan dengan isu-isu lingkungan hidup sebagaimana sifat dasar energi itu sendiri sebagai sumber-sumber kekayaan yang berasal dari alam maupun berbagai macam turunannya.

Perbedaan Persepsi Ancaman Energi

Aktor-aktor energi pada dasarnya memiliki perbedaan persepsi mengenai ancaman dalam isu keamanan energi. Para pakar atau pengamat energi mengklasifikasikan perbedaan persepsi tersebut antara pihak pemasok atau pembekal (*supplier*) dengan pihak pengguna atau pelanggan (*consumers*) (Leo Scharattenholzer , 2009: 355; Hans Gunter Brauch,2009:34; Klaus-Dietmar Jacoby (2009:346). Leo Scharattenholzer (2009: 355) menyatakan bahwa nampaknya konsep-konsep yang berbeda antara (*energy supply security*) dengan keamanan permintaan energi (*energy demand security*) selama ini kerap dianalisis secara identik (sama). Dalam kedua bentuk tersebut, keamanan bermakna meminimalkan risiko, yang membedakan hanya *unwanted events* saja yang berbeda secara alami. Perbedaannya bergantung pada sudut pandang: negara yang bergantung pada impor energi dari luar negeri berkepentingan untuk memastikan keamanan bekal energi, sementara negara pengespor minyak berkepentingan untuk menjaga keamanan

permintaan energi yang menyangkut kestabilan harga energi dunia (khususnya minyak atau gas). Dengan kata lain, konsep keamanan energi memiliki arti yang berbeda bagi pemasok atau pembekal (contohnya negara atau perusahaan produsen dan eksportir minyak akan lebih tertarik pada harga yang sesuai dan permintaan yang stabil (*steady demand*), sedangkan konsumen lebih tertarik pada pasokan atau bekal yang tak terganggu dan dengan harga yang terjangkau pula (Hans Gunter Brauch 2009:34).

Contohnya yang dialami negara-negara industri Barat sebagai negara-negara pelanggan energi (importir minyak), pasca Perang Dingin menghadapi ancaman yang lebih kompleks bagi mereka kerana sangat bergantung kepada negara-negara eksportir. Mereka menghadapi ancaman ganda, baik *energy-supply security* maupun *energy-distribution security*. Mereka menghadapi masalah-masalah seperti yang diuraikan oleh Michael T.Klare (2008:488) yang mencerminkan tahap kecemasan yang luas mengenai kedua hal tersebut, yaitu: *pertama*, apakah akan ada pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional pada tahun-tahun mendatang? ; dan *kedua*, apakah cadangan atau persediaan energi itu akan dapat diangkut dengan selamat dari tempat produksinya hingga tiba ke tempat yang memerlukannya (konsumen)? Kecemasan ini bersumber dari potensi ancaman terhadap fasilitas atau sarana minyak sebagai sasaran atau target gangguan oleh pemberontak, teroris, perompak, atau kelompok gerilya. Situasi ini membuat para pembuat kebijakan menjadi semakin khawatir mengenai cukup tidaknya pasokan energi di masa depan dan keamanan arus energi global.

Bagi negara-negara importir energi, hal kritis yang mendatangkan kerawanan bagi mereka adalah gangguan terhadap aliran pasokan tersebut (Fereidun Fesharaki et.al 1982:14). Seperti yang disusun oleh Leo Scharattenholzer (2009: 356) mengenai perspektif pelanggan (*consumers*), terdapat beberapa ancaman yang menggambarkan "*unwanted events*" antara lain adalah⁶:

- 1) rawannya bekalannya minyak terhadap gangguan alam dan serangan teroris;
- 2) penurunan jumlah bekalannya minyak dan gas;
- 3) penggunaan energi sebagai senjata oleh pemasok;
- 4) minyak menjadi sarana untuk menghindari pembaharuan demokrasi;
- 5) ancaman perubahan iklim; dan
- 6) tingginya harga minyak dunia.

Jika dikaitkan dengan lima dimensi keamanan dari Copenhagen school sebelumnya di atas, maka keenam ancaman tersebut menampakkan dimensi militer (serangan penganas), dimensi politik (energi digunakan sebagai "senjata" politik oleh pembekal), dimensi ekonomi (penurunan jumlah bekalannya tenaga dan tingginya harga minyak), dimensi sosial (energi sebagai sarana menghindari perubahan

⁶ Enam ancaman ini diadopsi oleh Leo Scharattenholzer dari US Senator Lugar on 13 March 2006 mengenai "New Realism" dalam keamanan nasional Amerika Serikat. Konsep 'energy security' merujuk pada enam ancaman tersebut.

demokrasi masyarakat/negara), dan dimensi lingkungan hidup (gangguan alam dan ancaman perubahan iklim).

Dalam konteks domestik pula, dimensi-dimensi tersebut juga cukup berkaitan erat yaitu merujuk pada kepedulian negara untuk mengamankan kestabilan energi dalam masyarakat bagi memenuhi kebutuhan ekonomi, politik, atau sosial, kerana hal ini akan menjamin dukungan dan legitimasi bagi negara. Semakin kuat dan stabil keamanan internal negara, semakin banyak pula para pembuat keputusan yang memiliki kapasitas lebih besar untuk melakukan manuver di tingkat regional dan bahkan internasional. Telah menjadi fakta yang diakui bersama bahwa kestabilan internal dan politik luar negeri senantiasa berinteraksi dan saling bertukaran kedudukan untuk saling mempengaruhi. Dengan arti lain, sumber-sumber ancaman keamanan energi ada yang bersumber dari dalam atau internal (*domestic*) maupun dari luar (*external*) serta dapat saling berhubung kait (*interlinking*) atau bahkan bertukaran (*interchangeability*).

RELEVANSI UNTUK KALIMANTAN TIMUR: IRONI DAN *RESOURCES CURSE* (?)

Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang kaya SDA dengan produksi energi terbesar di Indonesia - dengan sektor andalan yaitu migas dan batubara. Produksi energi Kaltim membuatnya dikenal sebagai lumbung energi yang berkontribusi menempatkan Indonesia sebagai pengeksport batubara termal terbesar di dunia. Walaupun provinsi ini kini bergerak menuju transformasi ekonomi pasca migas dan batubara, namun pembangunan ekonomi Kalimantan Timur saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian batubara (Visi Kaltim 2030:1-2). Dari eksplorasi perusahaan-perusahaan tersebut, Kalimantan Timur diakui sebagai provinsi dengan pengolahan minyak mentah terbesar di Indonesia (berada di Balikpapan) yaitu sebesar 55.702.776 Barrel⁷. Semua data-data statistik ini merupakan bukti nyata bahwa Kaltim memiliki kekayaan energi yang sangat luar biasa. Namun, kekayaan tersebut tidak berbanding lurus dengan keamanan energinya karena daerah ini menghadapi berbagai permasalahan energi hingga membuat daerah ini mengalami kondisi krisis energi, baik di kota maupun di desa.

Adapun persepsi ancaman yang timbul pun sifatnya berganda, baik sebagai daerah produsen atau penghasil energi sekaligus persepsi rakyatnya sebagai konsumen energi itu sendiri. Singkatnya, Kaltim menghadapi persepsi dan ancaman energi yang berlapis dan multidimensi - baik dalam dimensi ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, bahkan militer. Semuanya saling terkait dan saling mempengaruhi mulai dari hulu hingga ke hilir.

Pertama, dalam dimensi ekonomi-sosial, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara produksi energi yang berlimpah namun daya konsumsi masyarakat yang secara umum rendah. Harga bahan bakar yang tinggi akibat terjadinya kelangkaan di

⁷ *Idem*, hlm.43.

berbagai SPBU di berbagai daerah Kaltim, khususnya di daerah perbatasan yang menjadi pemandangan sehari-hari. Daerah yang kaya energi primer ini mengalami sebuah ironi yang diibaratkan banyak pihak sebagai “ayam mati di lumbung padi” dan dinilai sebagai daerah yang mendapat kutukan SDA (*resources curse*) tetapi tetap miskin (*dutch disease*) (Marwan Batubara, 2014:179-180). Betapa tidak, rakyat Kaltim mengalami kelangkaan energi listrik padahal sangat berlimpah dengan energi-energi primer (migas dan batubara).

Kedua, dalam dimensi politik, ironi dan teori kutukan SDA tersebut tidak terlepas dari faktor politik baik lokal pun nasional - termasuk dengan adagiumnya: *who get what, when and how*. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian ESDM, dinilai lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Kalimantan Timur selama ini yang memonopoli konsesi atau kepemilikan saham dan pengelolaan ladang-ladang migas dan batubara. Di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, dan tempat-tempat lain adalah kantong-kantong penghasil energi dengan kehadiran perusahaan-perusahaan asing. Bahkan, di Kutai Kertanegara terdapat Blok Mahakam dengan sumur-sumur minyak yang telah dieksploitasi puluhan tahun oleh perusahaan asing (TOTAL-Inpex), namun hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat dinilai minim jika dibandingkan dengan mega-mega proyek yang telah dilakukan selama ini. Singkatnya, Kaltim secara umum masih tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. *Bargaining* pemerintah daerah juga dinilai lemah dan kurang maksimal untuk memperjuangkan hak-hak daerah di sektor migas, belum lagi persoalan *mismanagement* dan pengelolaan CSR (*corporate social responsibility*) perusahaan yang dianggap kurang jelas dan kurang memadai untuk pengembangan kawasan dan masyarakat. Baru beberapa tahun belakangan ini pemerintah daerah, beserta beberapa organ lainnya, getol melayangkan gugatan ke pusat untuk memperjuangkan hak Pemprov Kaltim sebesar 10 persen dalam pengelolaan ladang migas *offshore* di Blok Mahakam, termasuk agar dikelola bersama Pertamina ketika kontrak dengan dua perusahaan asing itu berakhir di tahun 2017.

Ketiga, dalam dimensi lingkungan hidup, tidak terbantahkan bagaimana proses energi mulai dari eksploitasi, distribusi, hingga konsumsi energi telah mengancam keamanan lingkungan hidup dan menyebabkan gangguan serta kerusakan ekosistem/ekologis di Kaltim. Artinya, aktivitas energi yang tidak bertanggung jawab dan tidak berperspektif lingkungan hidup, bisa mengakibatkan efek yang sangat luas dan fatal. Hutan-hutan tropis (termasuk tanah ulayat) semakin kurang dan gundul akibat pembukaan lahan pertambangan hingga menyebabkan longsor, kebakaran hutan, dan degradasi hutan. Sardjono (2012:2) juga menguraikan bahwa kerusakan hutan tersebut tidak hanya membawa kerugian ekonomi bagi daerah dan masyarakat sekitarnya, tetapi juga akan menjadi kepunahan berbagai jenis flora fauna endemik dan langka, atau paling tidak membuat ruang hidup mereka terbatas. Demikian pula dengan limbah aktivitas produksi migas dan batubara juga berdampak pada pencemaran udara, air, dan tanah yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat pun keberlanjutan lingkungan secara luas. Bahkan, banyak bekas-bekas galian tambang yang dibiarkan terbuka pasca produksi hingga menelan tiga belas

korban jiwa (anak-anak) yang jatuh ke dalam kolam akibat ditinggal begitu saja oleh pemilik tambang⁸.

Keempat, dimensi militer (dan hubungan internasional) keamanan energi Kalimantan Timur terletak pada alur perdagangan energi dengan negara-negara tetangga serta akses transportasi pengangkutannya. Wilayah Kalimantan merupakan pemasok 70% impor batubara Filipina yang diangkut dengan kapal-kapal dagang melalui jalur laut yang rawan menghadapi gangguan-gangguan kejahatan maritim, seperti perompak (*piracy*), perampokan bersenjata (*sea robbery*), maupun potensi terorisme maritim. Kerawanan jalur laut yang dilalui kapal-kapal pengangkut batubara terbukti telah terjadi beberapa kali kasus penculikan ABK (anak buah kapal) di sekitar Laut Sulu, Mindanao, Filipina (sekitar Juni 2016 lalu). Kelompok militer bersenjata Abu Sayyaf mengaku bertanggung jawab atas penculikan-penculikan itu dan meminta tebusan kepada pemerintah Indonesia. Ancaman tersebut dari kelompok bersenjata tersebut menyebabkan otoritas pelabuhan di Kalimantan Timur terpaksa menghentikan izin pelayaran kapal-kapal batubara ke Filipina Selatan. Kondisi ini jelas merugikan secara ekonomi karena perairan sekitar Kalimantan Timur (Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Sulu) merupakan jalur maritim strategis sebagai alternatif kapal-kapal dagang yang tidak bisa melewati Selat Malaka.

Ancaman-ancaman terhadap transportasi laut dalam perdagangan energi ke luar negeri tersebut sebenarnya hambatan bagi pemerintah Kaltim untuk memaksimalkan posisi geo-eko strategisnya, mengingat akses dan jalur maritim Kaltim termasuk wilayah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II. ALKI II merupakan salah satu dari tiga alur koridor yang menghubungkan jalur maritim Utara-Selatan Kalimantan yang terbuka untuk pelayaran kapal-kapal asing sesuai ketentuan UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982. ALKI II bagian dari SLOCs (*Sea Lane of Communications*) Indonesia yang turut menghubungkan perairan di Asia Tenggara, Lautan Hindia dengan Lautan Pasifik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berasaskan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa energi dan keamanan merupakan isu yang cukup penting yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan adanya beragam bentuk ancaman, gangguan, kerusakan-kerusakan yang muncul dalam isu dan konsep ini, perlu diikuti dengan kesadaran untuk mencari jalan dan meningkatkan usaha-usaha penanganan atau strategi energi yang menyeluruh pula. Sebaliknya, jika masalah energi ini kurang diekspos atau kurang diteliti, maka perhatian akan dampak-dampak yang ditimbulkannya akan semakin terabaikan atau bahkan tidak menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Kalimantan Timur.

⁸ Kasus ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masih sangat rawan terulang kembali. Kasus ini dapat dianalisis lebih jauh mengenai ancaman energi terhadap keamanan manusia (*human security perspective*).

Adapun bangunan konsep dan pendekatan keamanan energi yang telah diuraikan di atas dapat berkontribusi untuk menambah referensi akademik bagi kajian-kajian energi selanjutnya, termasuk bagaimana studi kasus dalam konteks lokal Kalimantan Timur dapat ditinjau dalam berbagai perspektif, pendekatan, dan dimensi energi. Di situlah letak “kelebihan” kajian keamanan energi karena sifatnya yang multidimensi, *interlink*, dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai isu dan pendekatan, baik bersifat tradisional maupun bersifat non-tradisional, serta baik di level internasional, nasional, maupun hingga level lokal seperti masyarakat dan individu. Dengan kata lain, keamanan energi adalah bidang ilmu yang interdisipliner yang memerlukan pendalaman lebih lanjut mengingat tantangan energi di masa-masa mendatang cenderung semakin meningkat dan kompleks. Artikel ini menyarankan kajian atau penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai isu keamanan energi di Kalimantan Timur (dan Utara), khususnya dalam mencari solusi yang terbaik dan menyeluruh (*comprehensive*) bagi menyelesaikan masalah-masalah energi yang dihadapi selama ini dan di masa-masa yang mendatang.

REFERENSI

- Awang Faroek Ishak, Rusmadi, Daddy Ruhiyat, dan Bohari Yusuf. 2013. *Visi Kaltim 2030: Pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan (sebuah pemikiran kebijakan transformasi ekonomi pasca migas dan batubara)*. Samarinda: MGU.
- Aubrecht, Goedon J. 2006. *Energy Physical, Environmental, and Social Impact Third Edition*. NJ USA: Education, Inc.
- Buzan, Barry, Ole Wafer dan Jaap de Wilde . 1998. *Security: A New Framework for Analysis*, Colorado dan London: Lynne Rienner.
- Brauch, Hans Gunter. 2009 Introduction : facing global environmental change and sectorialization of security dalam *Facing global environmental change (environmental, human, energy, food, health and water security concepts)*, Berghouf foundation.
- Choucri, Nazri dan Vincent Ferraro. 1976. *International politics of energy interdependence*. Massachusetts: Lexington Books.
- Dorf, Richard C. 1978. *Energy, Resources, and Policy*. Philippines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Fesharaki, Fereidun, Harrison Brown, and Corazon M.Siddayao et.al. 1982. *Critical Energy Issues in Asia and the Pacific. The Next Twenty Years*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Hough, Peter. 2004. *Understanding global security*. London: Routledge .
- Jacoby, Klaus-Dietmar. 2010. Energy security: conceptualization of the International Energy Agency (IEA), dalam *Facing global environmental change (environmental, human, energy, food, health and water security concepts)*, Berghouf foundation.
- Klare, Michael T. 2008. *Energy Security* dalam Paul D. William (editor), *Security Studies: An Introduction*, Kanada dan New York: Routledge.
- Marwan Batubara. 2014. *Kembalikan Makaham: Memang hak kami (jalan terjal menuju kedaulatan migas)*. Jakarta: IRESS.
- Mustofa Agung Sardjono. 2012. Mengatasi degradasi hutan dan implikasinya guna menjamin pembangunan berkelanjutan di Kaltim. Dalam *Selamatkan Sumber daya Kaltim*. Samarinda: (terbitan) Alumni KPMKT.
- Scharattenholzer, Leo. 2010. Scenarios of energy demand and supply until 2100: implications for energy security, dalam *Facing global environmental change (environmental, human, energy, food, health and water security concepts)*, Berghouf foundation.

- Toichi, Tsutomu. 2006. *Energy Cooperation and Competition Between Japan, China and US*. Diakses dalam report@tky.ieej.or.jp
- Yong, Wang. 2005. *East Asia Community and Nontraditional Security: A Proposal from China*. Diakses dalam www.IRChina.org.
- Yi-chong, Xu. 2007. China's energy security. Dalam Michael Wesley (ed.), *Energy security in Asia*. New York: Routledge.
- Xiaojun, Ma. 2005. *East Asia Energy Strategy: Conflict or Cooperation*. Dilayari dari <http://www.aei.org>, 17 Desember 2009, 10:12 pm.